

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI EVALUASI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Muhammad Reza Ramdani¹
(Universitas Muslim Indonesia)
reza.ramdani@umi.ac.id

Abstract

This study examines the financial performance of the Central Halmahera government through the analysis of financial statement assessments. The purpose of this study was to determine the financial performance of the Central Halmahera Government. This research approach uses a quantitative approach. The source of data in this study is from the Central Halmahera Government Financial Report. Research data collection techniques with observation and desk study of reports or archives. The method of analysis uses descriptive by calculating the formula of regional financial independence ratio, Debt services coverage ratio (DSCR), the ratio of effectiveness and efficiency of local revenue results, activity ratios, growth ratios and liquidity ratios. The results showed the ability of the Central Halmahera District Government in financing government activities and development and community services was still relatively low and still needed funding assistance or loans from external parties.

Keyword : financial statement, financial performance, Halmahera Tengah

I. PENDAHULUAN

Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan (Ramdani dan Lestari 2019, Ramdani dan Kamidin 2018). Pemerintah sebagai pengelola dana anggaran APBD menuntut untuk menerapkan konsep akuntabilitas pada laporan keuangan Daerah (LKPD) sehingga bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai (Firth *et al.*, 2012). Pemberlakuan PP 58/2005, pemerintah melalui menteri dalam negeri mengeluarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang telah diperbaharui dengan dikeluarkannya peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 dan nomor 32 tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Salah satu aspek penting yang diatur dalam aturan tersebut sekaitan dengan pelaporan disebutkan bahwa pemerintah daerah diposisikan sebagai entitas pelaporan, sehingga pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang terdiri atas: (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (2) Laporan Aliran Kas; (3) Neraca Daerah; (4) Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan laporan pertanggungjawaban

atas pelaksanaan APBD kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran tahunan pemerintah daerah yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Kendala keuangan merupakan faktor penting dalam menentukan apakah perusahaan atau organisasi bertahan dan tumbuh (Ayyagari *et al.*, 2008).

James B. Whittaker (1995) dalam *Government Performance and Result Act, for Strategic Planning and Performance Measurement* mengungkapkan bahwa pengukuran/penilaian kinerja yaitu suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Perhatian yang besar terhadap pengukuran kinerja disebabkan oleh opini bahwa pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi, keefektifan, penghematan dan produktifitas pada organisasi sektor publik (Halacmi, 2005). Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi organisasi. Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa mendatang (Sumahrjo, 2010).

Liestiani (2008) menemukan bahwa kekayaan, kompleksitas pemerintahan, dan jumlah temuan audit memengaruhi tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan Lesmana (2010) menemukan bahwa umur Pemda dan rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Hasil berbeda terdapat pada penelitian Suhardjanto *et al.*, (2010) dengan menggunakan modifikasi model Patrick (2007) yang menemukan bahwa dana perimbangan dan latar belakang bupati merupakan prediktor yang signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan SAP yang wajib. Perbedaan penelitian terdahulu adalah pada artikel ini menggunakan perhitungan atas analisis keuangan dengan beberapa rasio keuangan guna mengetahui serta mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah halmahera tengah.

II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN

Menurut Teori keagenan, ada dua pihak yang membuat perjanjian atau kontrak, yaitu pihak yang memberi otoritas disebut prinsipal dan pihak yang menerima otoritas disebut agen (Halim dan Abdullah, 2006). *Agency problem* muncul ketika *principal* mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada *agent* (Zimmerman, 1977). Keterkaitan keagenan ini menimbulkan permasalahan, ialah adanya informasi asimetris, dimana pihak mempunyai informasi yang lebih mumpuni daripada pihak yang lain. Zimmerman (1977) mengatakan bahwa masalah keagenan terjadi di semua organisasi. Di perusahaan, masalah keagenan terjadi antara investor sebagai kepala sekolah dan manajemen sebagai agen. Laporan keuangan pokok yang harus disajikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pada bulan Oktober tahun 2010 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan basis akrual sebagai pengganti dari PP No. 24 tahun 2005. Namun, PP No. 71 tahun 2010 baru diterapkan paling lambat untuk laporan keuangan tahun anggaran 2015. PP No. 71 Tahun 2010 tidak hanya menerapkan basis akrual akan tetapi juga masih mengakomodir penerapan berbasis kas menuju akrual sebagaimana yang diatur dalam PP No. 24

Tahun 2005. Laporan keuangan merupakan bagian dari poses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan labarugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi dan penjelasan yang merupakan bagian yang integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga (IAI, 2007).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di dinas pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang berlokasi di jalan Skep No. 2 Weda, Kabupaten Halmahera Tengah. Sumber data dalam artikel ini adalah data yang berupa laporan keuangan yang termuat dalam Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun anggaran. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan langsung, wawancara terkait pelaporan keuangan pemerintah daerah dan dokumentasi pengumpulan arsip serta laporan keuangan tahun anggaran berjalan. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kuantitatif yaitu mendeksripsikan hasil laporan keuangan menggunakan perhitungan rasio antara lain :

1. Rasio Kemandirian Daerah
2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Hasil Pendapatan Daerah
3. Rasio Aktivitas (Rasio Kesenjangan)

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang di perlukan daerah. Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Ratio Kemandirian} = \frac{(\text{Pendapatan Asli Daerah})}{(\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman})}$$

Tabel 1. Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2016 dan 2017

No	Keterangan	Realisasi	
		2016	2017
1	Pendapatan	338.957.789.148,60	403.852.685.846,14
2	Pendapatan Asli daerah (PAD)	36.477.704.604,60	41.613.902.863,14
3	Pendapatan transfer dana perimbangan	299.606.288.367,00	354.222.275.318,00
4	Lain-lain pendapatan yang sah	2.873.856.177,00	8.016.507.665,00
5	Ratio kemandirian	12,06%	11,49%

Sumber: hasil perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Halmahera Tengah.

Dari perhitungan pada Tabel 1 di atas diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun anggaran 2016 sebesar 12,06% dan tahun anggaran 2017 sebesar 11,49%. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat masih rendah dan bahkan cenderung mengalami penurunan. Peningkatan pendapatan asli daerah yang juga diikuti dengan peningkatan pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang lebih besar sehingga tidak cukup mempengaruhi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Oleh karena itu, perlu adanya usaha pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan. Pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi), baik melalui pengoptimalan sumber pendapatan asli daerah yang mengalami penurunan di tahun anggaran 2017 maupun dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang sampai saat ini masih di

kuasai pusat atau provinsi. Untuk mengukur tingkat kemampuan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan pemerintah dan pembangunan, beberapa ratio yang dapat digunakan antara lain :

1) Rasio Efektifitas dan Efisiensi

Rasioefektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila ratio yang dicapai minimal sebesar 1(satu) atau 100 persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

$$\text{Ratio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas perlu diperbandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2016 dan 2017

No	Keterangan	2016	2017
1	Target Penerimaan PAD	35.431.487.891,00	41.768.798.008,00
2	Realisasi Penerimaan PAD	36.477.704.604,60	41.613.902.863,14
3	Biaya Pungutan PAD	151.365.332,00	204.992.320,00
4	Ratio Efektifitas	102,95%	99,63%

Sumber : Hasil Perhitungan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Tengah

Pada tahun Anggaran 2017, rasio efektifitas Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah mencapai 102,95 %. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah cukup efektif dalam melakukan pemungutan sumber pendapatan daerah. Beda hanya pada tahun anggaran 2017 dimana ratio efektifitasnya berada di bawa standar, yaitu hanya berkisar 99,63 %. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak efektif dalam merealisasikan sumber pendapatan asli daerah khususnya dalam melakukan pemungutan daerah. Sedangkan dari perhitungan rasio efisiensi di atas menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dapat dikatakan sangat efisien karena memenuhi persyaratan, yaitu kurang dari 1 atau 100%. Ratio efisiensi pada tahun anggaran 2017

lebih besar di bandingkan tahun anggaran 2016 mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengalami penurunan kinerja dari segi efisiensinya dalam melakukan pemungutan sumber pendapatan.

2) Rasio Aktifitas (Rasio Keserasian)

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja perasi (belanja rutin). Dan belanja modal (belanja pembangunan) secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio ini dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Ratio Belanja Operasi Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}}$$

$$\text{Total Belanja Modal Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

Tabel 3. Perhitungan Rasio Aktifitas Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2016 dan 2017

No	Keterangan	Realisasi	
		2016	2017
1	Belanja operasi	233.765.869.276,23	236.596.068.416,04
2	Belanja modal	73.260.078.330,77	121.391.292.827,00
3	Total belanja	307.025.947.607,00	375.987.379.243,04
4	Ratio belanja operasi	76,14%	66,09%
5	Ratio belanja modal	23,86%	33,91%

Sumber: Hasil Perhitungan Rasio Aktifitas Kabupaten Halmahera Tengah.

Dari perhitungan rasio pada table 3 di atas terlihat bahwa sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah masi diprioritaskan untuk kebutuhan belanja modal terhadap APBD masi relative kecil. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun modal terhadap APBD yang ideal karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian sebagai Negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masi relative besar. Hal ini telah ditunjukkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dimana terhadap rasio belanja

modal terhadap APBD di tahun anggaran 2017 lebih besar dibandingkan rasio pada tahun 2016. Dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah telah berhasil meningkatkan pembangunan dengan menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat, khususnya pada pengadaan bangunan dan jalan.

3) Rasio Pertumbuhan (*growth ratio*)

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari period eke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran , dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

Tabel 4. Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2016 dan 2017

No	Keterangan	2016	2017	Pertumbuhan (%)
1	PAD	36.477.704.604,60	41.613.902.863,14	14,08
2	Belanja Operasi	233.765.869.276,23	236.596.086.416,04	1,21
3	Belanja Modal	73.260.078.330,77	121.391.292.827,00	65,7

Sumber : Hasil Perhitungan APBD Kabupaten Halmahera Tengah.

Dari perhitungan ratio table 4 di atas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan APBD Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun anggaran 2016-2017 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pendapatan asli daerah dan peningkatan kebutuhan daerah dan peningkatan kabupaten daerah yang menyebabkan operasi dan belanja modal juga meningkat.

V. SIMPULAN

1. Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan social kepada masyarakat masih relatif rendah dan bahkan cenderung menurun yaitu dari 12,06% pada tahun anggaran 2016 menjadi 11,49% pada tahun anggaran 2017. Hal ini disebabkan karena pada tahun anggaran 2017 terdapat salasatu jenis pendapatan asli daerah, yaitu retribusi daerah, terealisasi kurang dari yang dianggarkan. Selain itu, dana perimbangan atau pendapatan transfer dari pemerintah pusat atau provinsi juga meningkat tajam dibandingkan dengan peningkatan pendapatan asli daerah dan juga timbulnya dana cadangan pada tahun anggaran 2017 yang mengakibatkan kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah semakin rendah.
2. Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya tergolong efektif dan efisien pada tahun anggaran 2016 karena memiliki ratio efektifitas sebesar 102,95% dan ratio efisiensi sebesar 0,42%. Akan tetapi kinerjanya menurun pada tahun 2017 karena memiliki ratio efektifitas

dibawah standar yaitu sebesar 99,63% dan ratio efisiensi yang meningkat sebesar 0,49%. Hal ini disebabkan karena pendapatan retribusi daerah pada tahun anggar 2017 tidak semuanya dapat direalisasikan dan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah kurang efektif dan efisien dalam melakukan pemungutan sumber pendapatan daerah.

VI KETERBATASAN PENELITIAN

1. Penelitian hanya menitikberatkan dalam menilai tentang kinerja keuangan pemerintah Halmahera.
2. Beberapa indikator atau faktor yang belum tercover dalam penelitian ini.

VII. SARAN

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah sebaiknya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengolah sendiri kekayaan daerahnya yang menjadi sumber pendapatannya sehingga dapat mengurangi ketergantungannya terhadap pihak eksternal atau pihak luar.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya meneliti dan mengeksplorasi laporan keuangan lebih dalam khususnya di bagian pengelolaan kas daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayyagari, M., Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. 2008. How important are financing constraints? The role of finance in the business environment. *The world bank economic review*, 22(3), 483-516.
- Lesmana, S. I. 2010. Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib di Indonesia. *Universitas Sebelas Maret. Surakarta*.
- Ramdani, M. R., & Kamidin, M. 2018.

- IMPLEMENTASI SAK-ETAP PADA UMKM WARKOP DI KOTA MAKASSAR. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 3(2), 109-117
- Ramdani, M. R., & Lestari, I. A. 2019. Re-kognisi Publik Pengguna Pelayanan Akuntan Terhadap Tingkat Moralitas Akuntan Publik. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 19(2).
- Firth, M., Malatesta, P. H., Xin, Q., & Xu, L. (2012). Corporate investment, government control, and financing channels: Evidence from China's Listed Companies. *Journal of Corporate Finance*, 18(3), 433-450.
- Halim, A., & Abdullah, S. 2010. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 53-64.
- Halachmi, A. 2005. Performance measurement is only one way of managing performance. *International journal of productivity and performance management*, 54(7), 502-516.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta Salemba Empat.
- Patrick, P. A. 2007. The determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government (Doctoral dissertation, Pennsylvania State University).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, Bandung Fokusmedia 2008
- Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. R. 2011. Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada kabupaten/kota di Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8(1), 30-42.
- Sumarjo, H. 2010. Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Doctoral dissertation, UNS).
- Undang-undang Otonomi Daerah .2004. Bandung, fokusmedia
- Whittaker, J. B. 1995. *Government Performance and Results Act of 1993*. Educational Services Institute.
- Zimmerman, J. L. 1977. The municipal accounting maze: An analysis of political incentives. *Journal of Accounting Research*, 107-144.